



Kebangkitan Tiongkok Dalam Membendung Hegemoni Amerika Serikat: Studi Kasus Sengketa Laut China Selatan

Emil Hikmawan¹⁾, Fahriza Muhammad²⁾, Ahmad Sahide³⁾

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

emil.hikmawan.psc20@mail.umy.ac.id¹⁾
fahriza.muhammad.psc20@mail.umy.ac.id²⁾
ahmadsahideumy@gmail.com³⁾

Abstrak

The South China Sea dispute is one of the conflicts that is contesting territorial waters in Southeast Asia. In addition, the South China Sea region has economic and political potential. The study aims to look at the contest between the United States and China in the South China Sea dispute. To obtain the data, we take the news, documents and official statements from the online media. Based on Hans Morgenthau's theory of realism, the result found that China's rise in economy, politics and military is a form of increasing the country's strength. With this power, China has an aggressive stance in the South China Sea dispute to stem the hegemony of the United States, especially in the Asia-Pacific region. This is evidenced by the existence of the Belt Road Initiative (BRI) megaproject as a trade route connecting Asia, Europe and Africa. This result implies that the United States consider China's current rise as a threat that would undermine the supremacy of the United States. Therefore, the United States should increase its military strength to maintain world security and peace in the Southeast Asian region.

Keywords: Belt Road Initiative, South China Sea, Supremacy, Tiongkok, United States.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya isu dalam kajian hubungan internasional yang menarik untuk dibahas salah satunya adalah konflik Laut China Selatan. Dalam perkembangannya konflik ini masih terus berlangsung dan juga belum ditemukan solusi yang konstruktif. Di samping itu, ketegangan yang terjadi dalam sengketa Laut China Selatan menggambarkan sikap atau tindakan saling klaim antar pihak yang berkonflik. Terlepas dari berbagai klaim yang bermunculan dapat dijadikan sebagai legitimasi untuk negara-negara yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan. Lebih lanjut, adanya sengketa di wilayah perairan internasional ini tentu akan memunculkan perilaku negara untuk mendapatkan sumber kekuasaan baru dalam rangka menjadi negara yang mampu memberikan pengaruh sebagai hasil dari perebutan kekuasaan.

Di sisi lain, penguasaan terhadap suatu wilayah digunakan oleh negara untuk menyebarluaskan pengaruhnya. Untuk itu, dalam konteks konflik Laut China Selatan merupakan konflik yang didasarkan atas kedaulatan maritim dan teritorial (Junef, 2018). Secara jelas konflik Laut China Selatan ini merupakan sebuah fenomena dalam geopolitik internasional. Selanjutnya pada tahun 2016 sengketa Laut China Selatan dibawa oleh Filipina ke pengadilan internasional untuk mencari penyelesaiannya. Sehingga keputusan dari pengadilan internasional ini menolak klaim dari Tiongkok atas kepemilikan wilayah Luat China Selatan berdasarkan Sembilan Garis Imajiner (Almond, 2018). Namun Tiongkok menolak keputusan tersebut dan tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Sehingga, faktor inilah yang turut menyebabkan konflik Laut China Selatan masih berlangsung hingga saat ini.



Dalam perkembangannya konflik Laut China Selatan semakin memanas yang ditandai dengan tindakan provokatif dari pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh Tiongkok mengirimkan kapal induknya, Liaoning sebagai respon dari Amerika Serikat yang juga mengirimkan kapal induknya, USS Theodore Roosevelt ke Laut China Selatan (Sorongan, 2021). Tindakan ini dilakukan baik oleh Tiongkok maupun Amerika Serikat dengan alasan sebagai antisipasi jika eskalasi konflik di wilayah perairan meningkat. Hal ini tentunya menggambarkan bahwa tujuan utama dari Tiongkok dan Amerika Serikat dengan masing-masing kekuatan militernya kemungkinan ingin memberikan stabilitas politik dan keamanan di regional. Selain itu, perilaku ini menandakan aksi timbal balik (*reciprocity*) untuk menunjukkan kekuatan tempur.

Di satu sisi, Tiongkok ingin membangun kekuatan dalam menghadapi pihak eksternal yang ikut campur dalam konflik Laut China Selatan jika terjadi serangan. Di sisi lain, Amerika Serikat menunjukkan hal yang berbeda yaitu demi menjaga kebebasan bernavigasi. Terdapat 2 kepulauan besar yang menjadi perhatian negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan yaitu Paracels dan Sparty (BBC, 2016). Sebenarnya pulau ini tidak layak huni akan tetapi potensi sumber daya alam didalamnya dan sebagai jalur perdagangan internasional membuat negara-negara memperebutkan wilayah tersebut. Potensi sumber daya alam yang dimaksud antara lain minyak, gas alam dan hasil laut (BBC, 2020). Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh *The US Energy Information Administration* (EIA) bahwa terdapat 11 miliar baler cadangan minyak dan 190 triliun kaki kubik cadangan gas alam (US Energy Information Administration, 2013).

Selain itu Laut China Selatan sebagai jalur perdagangan yang menghubungkan Selat Malaka-Jepang, Singapura-Hongkong, Guangzhou-Manila (Farhana, 2014). Menurut laporan yang disampaikan oleh *Center for Strategic and International Studies* bahwa sepanjang tahun 2016 terdapat barang dagangan yang melewati perairan Laut China Selatan mencapai nilai 3,4 triliun dollar AS (Kompas, 2020). Faktor-faktor inilah yang menjadi daya tarik negara-negara untuk menguasai wilayah Laut China Selatan, sehingga kekayaan merupakan elemen penting dalam meningkatkan kekuatan negara. Dalam perkembangannya, sesuatu yang menjadi perhatian adalah peningkatan kekuatan dari Tiongkok dari sisi ekonomi dan politik yang senantiasa akan semakin memperkeruh konflik Laut China Selatan.

Selanjutnya terdapat upaya penyelesaian yang setidaknya dapat menurunkan eskalasi konflik. Upaya ini tercerminkan dalam *Declaration of Conduct* yang telah diadopsi sejak 1992 oleh ASEAN sebagai kesepakatan formal dengan Tiongkok untuk menyelesaikan sengketa dengan pendekatan damai (Haryanto & Bainus, 2017). Dalam perkembangannya, ASEAN berhasil mengajak Tiongkok untuk berkomitmen dalam mematuhi prinsip hukum internasional dan menyelesaikan sengketa Laut China Selatan dengan cara damai tanpa meningkatkan eskalasi konflik yang pada akhirnya ditandatangani tahun 2002 di Kamboja (Kemlu RI, 2013). Komitmen tersebut tentu membuat negara ASEAN memiliki semangat positif untuk menyelesaikan sengketa Laut China Selatan yang selanjutnya dituangkan dalam *Code of Conduct* yang dinisiasi 2018 akan tetapi upaya negosiasi ini dapat dikatakan mengalami kegagalan karena sikap Tiongkok, misalnya Tiongkok yang sangat keberatan terhadap putusan dari Pengadilan Arbitrase Permanen dalam konteks kepemilikan Laut China Selatan (Quang, 2019).

Dengan kata lain, di zaman kontemporer ini dapat dipahami sebagai era kebangkitan Tiongkok yang memiliki ambisi untuk menggeser bahkan menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai negara super power. Artinya, keterlibatan Tiongkok yang lebih agresif dalam konflik Laut China Selatan menunjukkan kepentingannya dalam menguasai dunia. Maka dari itu, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai kontestasi dari aktor negara yaitu antara Tiongkok dengan Amerika Serikat yang menjadi aktor dominan dalam Sengketa Laut China Selatan. Hal ini penting untuk dibahas mengingat Tiongkok saat ini ingin menunjukkan dominasinya dalam konstelasi dunia internasional yang dilihat dari aspek politik, ekonomi dan militer.

Sebelum menjawab pertanyaan penelitian akan ditelaah lebih lanjut tulisan-tulisan terdahulu yang membahas Sengketa Laut China Selatan. Dalam artikel jurnal yang berjudul "*Cooperation & Security Dilemma in the South China Sea: Conflict Management & the Increasing of China's Power*" (Widian & Arimadona, 2018). Tulisan ini memaparkan bahwa berdasarkan konsep dilemma keamanan oleh Robert Jerwis dalam melihat kekuatan Tiongkok untuk menguasai wilayah perairan Laut China Selatan. Adapun kekuatan yang dimaksud adalah melalui kekuatan militer yang semakin ofensif. Selain itu dalam artikel "*Memahami perspektif Tiongkok dalam upaya penyelesaian sengketa Laut China Selatan*" melihat pandangan Tiongkok dalam mengklaim kepemilikan wilayah Laut China Selatan berdasarkan warisan sejarah dan menekankan solusi damai secara bilateral dibandingkan multilateral terhadap pihak-pihak yang melakukan protes terhadap Tiongkok (Farhana, 2014).

Selanjutnya tulisan yang berjudul “*Kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Laut China Selatan*” memberikan pandangan kepentingan sebuah negara melalui teori kepentingan nasional. Artikel ini menunjukkan kepentingan politik Amerika Serikat dalam sengketa Laut China Selatan yakni mempertahankan hegemoninya di kawasan Asia Pasifik terhadap ancaman dari Tiongkok sebagai kekuatan baru (Bidara et al., 2018). Lebih lanjut bahwa tulisan “*Hubungan Malaysia-China Dalam Isu Laut China Selatan: Satu Analisis*” mengelaborasi pola hubungan diplomatik antara Malaysia dan China saat terjadinya sengketa Laut China Selatan (Zizi et al., 2020). Hal ini dapat dibuktikan bahwa Malaysia cenderung masih menunjukkan hubungan baik dan kokoh yang bersifat holistik dengan pemerintah Tiongkok dikarenakan ketergantungan ekonomi Malaysia terhadap Tiongkok.

Dalam artikel lain “*Indonesia’s South China Sea Diplomacy: A Foreign Policy Illiberal Turn*” menjelaskan corak diplomasi Laut China Selatan Indonesia di era Presiden Joko Widodo (McRae, 2019). Politik luar negeri bebas aktif menjadi pedoman pemerintah Indonesia dalam menangani sengketa Laut China Selatan. Sehingga Indonesia terus menggunakan pendekatan diplomasi baik bilateral maupun multilateral. Pandangan lain mengenai ancaman sengketa Laut China Selatan bagi ASEAN di bahas dalam artikel “*Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Ancaman Bagi Komunitas Keamanan ASEAN*” (Haryanto & Darmawan, 2017). Artikel ini menjelaskan agenda pembentukan komunitas keamanan di ASEAN yang mengalami dinamika karena adanya sengketa Laut China Selatan. Hambatan tersebut adalah terganggunya penyebaran norma-norma ASEAN dan skema pencegahan konflik.

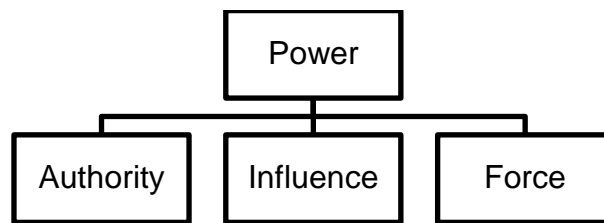
Gagasan lain yang ditulis dalam artikel “*Implikasi Declaration of Conduct Laut Tiongkok Selatan Tahun 2002 Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa*” (Haryanto & Bainus, 2017). Lebih lanjut artikel ini menjelaskan kesepakatan formal DoC 2002 belum mampu untuk meredakan sengketa terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan. Kesepakatan ini memiliki kelemahan secara obligasi, presisi dan delegasi yang rendah yang pada akhirnya belum dapat mengatur pihak-pihak yang bersengketa. Sementara dalam artikel berjudul “*China and the South China Sea Arbitration: Geopolitics Versus International Law*” (Zhao, 2018). Artikel ini menjelaskan bagaimana manuver geopolitik Tiongkok ketika Filipina membawa kasus sengketa Laut Cina Selatan ke Pengadilan Arbitrase Internasional yang dimenangkan oleh Filipina secara hukum. Namun keputusan yang mengikat dari Pengadilan Arbitrase Internasional tidak sama sekali mempengaruhi Tiongkok atas kepemilikan Laut Cina Selatan karena status Tiongkok sendiri sebagai *rising world power*.

Dalam artikel lain “*New Chinese Leadership, New Policy in the South China Sea Dispute?*” (Chan & Li, 2015). Artikel ini menjelaskan Presiden Xi Jinping menerapkan kebijakan terkait sengketa kemaritiman kepulauan Diaoyu/Senkaku dengan Jepang ketika Xi Jinping masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT) tahun 2012. Xi Jinping mengeluarkan *statement* dan tekanan keras terhadap Jepang mengenai sengketa kepulauan Diaoyu/Senkaku. Cara ini juga diterapkan oleh Xi pada kasus sengketa Laut Cina Selatan. Namun reaksi dari negara-negara di Asia Tenggara lebih keras daripada Tiongkok dan cenderung mengabaikan peringatan yang dikeluarkan oleh Tiongkok. Dengan demikian, berdasarkan berbagai penelitian terdahulu di atas masih belum banyak membahas fenomena kebangkitan Tiongkok untuk mendapatkan pengaruh Laut China Selatan dalam konteks strateginya untuk menguasai kawasan Asia-Pasifik dan meredam hegemoni Amerika Serikat.

Dalam menjawab penelitian ini akan digunakan teori realisme Hans Morghentau. Konsep *power* merupakan salah satu konsep paling utama dalam hubungan internasional (Mas'oed, 1990, pp. 135) Sebab definisi *power* yaitu kemampuan suatu pihak untuk mempengaruhi pihak lain baik dalam tindakan maupun pikiran. Dalam perkembangannya konsep *power* menimbulkan dua perdebatan besar. Perdebatan pertama menyangkut *power* sebagai atribut *tangible* yang dimiliki suatu aktor atau atribut yang muncul dari hubungan dua aktor yang selalu berubah. Sedangkan perdebatan kedua menyangkut besaran daya paksa (*force*) sebagai salah satu determinan *power* (Mas'oed, 1990, pp. 135-136)

Secara sederhana konsep *power* Morghentau digunakan untuk memahami segala tindakan yang dilakukan aktor A untuk menciptakan dan mempertahankan pengendaliannya atas aktor B yang dilihat dari tiga unsur: daya paksa (*force*), pengaruh (*influence*), dan wewenang (*authority*). Daya paksa (*force*) merupakan penggunaan kekuatan militer, ekonomi, atau sarana pemaksa lainnya oleh aktor A terhadap aktor B demi mencapai tujuan politik A. Pengaruh (*influence*) merupakan penggunaan alat-alat persuasi (tanpa kekerasan) oleh aktor A demi menjamin agar perilaku aktor B sesuai dengan keinginan aktor A. Unsur terakhir, wewenang (*authority*), diartikan sebagai sikap tunduk aktor B pada arahan (nasihat, perintah) yang diberikan oleh aktor A. Hubungan *power* dengan ketiga unsur di atas dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini.

Gambar 1. Unsur-Unsur Power



Sumber: (Mas'ood, 1990, pp. 138)

Konsep *power* memberikan pondasi bagi kelahiran konsep lainnya yang berkaitan dengan *power* yaitu kekuatan nasional (*national power*). *National power* secara garis besar dapat diartikan sebagai kekuatan yang digunakan oleh negara, untuk menciptakan dan mempertahankan pengendalian terhadap aktor lainnya. Dalam memahami konsep *power* di atas dapat dipahami dari beberapa elemen. *Pertama*, keadaan geografis seperti luas wilayah, posisi geografis, kenampakan bentang alam seperti gunung, sungai dan laut yang dimiliki menjadi karakteristik yang melekat pada suatu negara menentukan besar kecilnya kekuatan nasional yang dimiliki dan dapat mempengaruhi posisi negara tersebut di mata negara lainnya.

Kedua, negara dengan kemampuan industri yang tinggi berarti negara tersebut mampu mengolah sumber daya alam yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakatnya. Kemampuan industri memegang peranan penting karena negara yang mampu menyediakan sarana dan prasarana militer, seperti senjata ringan, tank dan kendaraan tempur, kapal perang, pesawat tempur hingga infrastruktur pendukung. Maka peluang negara untuk memenangkan perang jauh lebih besar. *Ketiga* yakni kesiapan militer yang dapat dilihat dari aspek penguasaan teknologi, kepemimpinan dan penguasaan strategi militer, kualitas dan kuantitas angkatan bersenjata (Morghentau & Thompson, 1985, pp.139). Negara dengan penguasaan teknologi yang tinggi akan selalu berinovasi dalam menciptakan alat-alat persenjataan baru yang berguna ketika menghadapi militer negara lawan. *Keempat*, negara dengan populasi yang besar tidak secara otomatis menjadikan negara tersebut menjadi negara terkuat. Akan tetapi, populasi penduduk yang besar berimbas pada peningkatan *national power* apabila populasi tersebut disalurkan untuk keperluan industri dan militer (Morghentau & Thompson, 1985, pp. 143).

Selain itu, kemampuan berdiplomasi menjadi elemen penting dalam kekuatan nasional, karena posisinya dapat disetarakan sebagaimana halnya petinggi militer ketika menggunakan strategi dan taktik militer dalam peperangan (Morghentau & Thompson, 1985, pp. 159). Lebih lanjut, hubungan internasional dewasa ini lebih didominasi oleh kerja sama antar aktor dan isu-isu non-militer dimana mengurangi relevansi penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan isu-isu bersama sekaligus mencapai kepentingan nasional masing-masing negara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus sebagai unit analisis. Sumber data diambil dari berita, dokumen, jurnal dan pernyataan resmi pejabat yang memiliki relevansi dengan topik penelitian melalui media online. Teknik pengolahan data yaitu penulis memperoleh informasi melalui sumber data sebelumnya. Tahap selanjutnya yaitu menuliskan poin-poin penting yang terdapat dalam data yang didapatkan sebelumnya. Setelah itu, penulis melakukan pemetaan (*coding*) untuk mereduksi data. Tahapan yang terakhir adalah menuliskan hasil analisis terhadap objek penelitian. Adapun hasil penelitian akan dituliskan dalam bentuk deskriptif analitik. Dengan kata lain, interpretasi mendalam terhadap suatu masalah menjadi aspek penting dalam memaparkan isi penelitian yang kemudian akan ditarik kesimpulannya di bagian akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Dinamika Konflik Laut China Selatan

Secara historis konflik Laut China Selatan bermula dari adanya klaim dari pemerintah Tiongkok yang memasukkan *Nine Dash Line* (Garis Putus-Putus) ke dalam peta resmi negaranya (Vujakovic, 2020). Dasar klaim yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok tersebut bukan berarti tidak memiliki alasan dibelakangnya. Pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa Laut China Selatan merupakan suatu warisan sejarah yang dimilikinya dan harus dipertahankan dari berbagai ancaman (Hayton, 2019). Maka dari itu, kedaulatan wilayah merupakan aspek penting bagi negara untuk memposisikan dirinya sebagai



entitas politik dalam menjaga kepentingannya. Kedaulatan wilayah yang sifatnya sangat politis karena berkaitan dengan keutuhan suatu negara. Selain itu, klaim dari pemerintah Tiongkok atas Laut China Selatan berdampak pada terjadinya ketegangan di regional Asia Tenggara. Lebih lanjut campur tangan asing dalam hal ini Amerika Serikat semakin memperkeruh permasalahan tersebut. Terlihat secara jelas bahwa perselisihan oleh negara-negara menggambarkan masih terjadinya perebutan kekuasaan dengan cara apapun.

Lebih lanjut, kondisi memanas yang terjadi terhadap Laut China Selatan tentu disebabkan karena faktor geopolitik yang saling berbenturan satu sama lain (Perez-Alvaro & Forrest, 2018). Sebab sifat geopolitik itu sendiri merupakan pola hubungan kekuasaan dengan memperhatikan faktor geografi. Sehingga dinamika geopolitik yang terjadi merupakan alasan mendasar mengapa Laut China Selatan senantiasa diperebutkan. Apabila sebuah negara mampu menguasai wilayah tertentu maka akan mendapatkan pula potensi apapun yang terdapat didalamnya untuk membangun kekuasaan. Kemudian keterlibatan dari banyak aktor internasional dalam hal ini negara telah membuat masalah Laut China Selatan semakin kompleks. Beberapa negara yang diantaranya yaitu Vietnam, Taiwan, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Tiongkok (Setiawan, 2017).

Dari sisi aktor di Asia Tenggara dapat kita cermati bersama sejauh mana tindakan dan kepentingannya dalam konflik wilayah perairan ini. Sebagai contoh Vietnam dan Filipina. Berbicara mengenai kepentingan nasional yang merupakan wujud dari perilaku negara dengan menggunakan instrumen politik luar negeri. Dalam konteks konflik Laut China Selatan, Vietnam juga merupakan negara yang terlibat didalamnya. Sehingga keterlibatan Vietnam juga dapat dinilai sebagai strategi untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Adapun kepentingan nasional Vietnam adalah ketahanan energi sebagai potensi untuk meningkatkan ekonomi negara (Lendon, 2020). Jika Vietnam berhasil untuk menguasai Pulau Spratly dan Pulau Paracel yang termasuk di wilayah Laut China Selatan. Maka Vietnam akan mendapatkan keuntungan ekonomi mengingat kawasan tersebut melakukan banyak kegiatan pelayaran sebagai jalur perdagangan.

Adapun dalam mencapai kepentingan tersebut, Vietnam melakukan beberapa cara diantaranya mencari dukungan melalui forum kelembagaan ASEAN dan meningkatkan hubungan kerjasama militer dengan Amerika Serikat (Ciorciari & Weiss, 2012). Di satu sisi, terbatasnya sumber daya alam di masa depan membuat negara harus melakukan ekspansi untuk. Di sisi lain, dengan membangun kemitraan strategis dengan negara maju tentu akan menjadikan suatu kekuatan untuk membentuk aliansi dalam menghadapi musuh bersama yang menjadi ancaman terhadap kepentingan nasionalnya. Hal ini yang juga turut dilakukan oleh Vietnam untuk mengatasi klaim dari Tiongkok tersebut.

Vietnam mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan Tiongkok yang sempat memburuk akibat konflik perbatasan pada 1979, namun jalan Vietnam untuk rujuk kembali dengan Tiongkok tidaklah mulus. Tensi yang mulai memanas dalam konflik LCS membuat Vietnam mencari cara agar hubungannya dengan Tiongkok tidak memburuk namun sambil tetap mempertahankan klaim Vietnam atas Spratly dan Paracel. Satu cara yang diambil Vietnam adalah dengan menjalin berbagai kerjasama dalam bidang politik dan ekonomi dengan Tiongkok namun disisi lain Vietnam membuat program untuk memodernisasi militernya dengan negara selain Tiongkok, Rusia dalam hal ini menjadi partner utama Vietnam dalam memodernisasi angkatan perangnya.

Vietnam juga membuat kebijakan penyeimbang dari ancaman Tiongkok dengan memanfaatkan organisasi regional seperti ASEAN dan membuat satu kebijakan yang dinamakan "*The Three No Principles*". Kebijakan yang dibuat Vietnam ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan kawasan dan tidak akan "diarahkan" ke negara ketiga (baca: Tiongkok). Kebijakan ini dibuat untuk meminimalisir kekhawatiran Tiongkok akan Vietnam yang getol membangun kerjasama militer dengan negara selain Rusia seperti Amerika Serikat, India, dan Jepang. Isi dari "*The Three No Principles*" itu sendiri adalah: *no military alliance, no foreign military base on Vietnams' soil, and no relationship with one country to be used against a third country*". (Hiep, 2016). Versi lengkap dari "*The Three No Principles*" dikutip dari Buku Putih Pertahanan Vietnam Edisi 2004.

"Vietnam's policy is not to join any military alliance, not to allow any foreign country to establish military base in Vietnam, and not to take part in any military action that uses force or threatens to use force against another country. However, Vietnam is ready to defend itself against any violation its territory, air space, waters and national interest; Vietnam is not going to undertake arm races, but constantly strengthens its military capabilities for the purpose of sufficient self-defence."



Selain itu perilaku agresif yang ditujukan oleh Tiongkok atas klaimnya terhadap Laut China Selatan turut mengundang perhatian Filipina. Sehingga dibutuhkan identifikasi lebih lanjut oleh pemerintah Filipina khususnya di era pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Oleh karenanya Filipina memerlukan kebijakan luar negeri untuk mengatasi sengketa wilayah maritim kedua negara. Karena kedaulatan merupakan elemen penting dalam mempertahankan keutuhan negara dari berbagai ancaman. Maka dari itu wilayah yang disengketakan oleh kedua negara adalah Dangkalang Karang Scarborough (The Guardian, 2012).

Lebih lanjut di masa kepemimpinan Presiden Duterte memang telah menyadari kehadiran Tiongkok di Laut China Selatan. Bahkan sampai mengetahui bahwa Tiongkok telah melakukan pembangunan struktur dan pangkalan militer di Dangkalang Karang Scarborough (CNN Philippines, 2020). Namun Presiden Duterte tidak menganggap sengketa di wilayah tersebut sebagai masalah yang terlalu serius terhadap keutuhan wilayah Filipina. Selain itu, menurut Presiden Duterte pembangunan yang masif dilakukan oleh Tiongkok tersebut merupakan tindakan yang dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan bukan pada teritorial Filipina.

Walaupun terdapat pandangan yang berbeda antara Presiden Duterte dengan Kelompok Kepentingan, seperti masyarakat sipil dalam melihat pendudukan Tiongkok di Dangkalang Karang Scarborough. Sebenarnya Presiden Duterte lebih memandang Laut China Selatan dengan tujuan untuk perlindungan keutuhan wilayah, mempertahankan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional Filipina (Ramadani & Trisni, 2019). Maka dari itu, baik masyarakat Filipina maupun pemerintah mengharapkan Presiden Duterte lebih bijaksana dalam mengatasi hal tersebut dengan tetap mengakomodasi kepentingan dari berbagai pihak dan pertahanan wilayah bersifat mutlak.

Berbicara mengenai kepentingan perlindungan terhadap keutuhan wilayah Filipina adalah dengan maksud Filipina mengklaim wilayah Kalayan Island Group dan Dangkalang Karang Scarborough tahun 1950 dan tahun 2009 (Ortueste, 2013). Adapun dasar klaim dari Filipina adalah dengan ketentuan yang mengacu pada UNCLOS terkait wilayah perairan dengan jarak 200 mil laut. Selain itu, total keseluruhan wilayah yang diklaim oleh Filipina diperkirakan mencapai 168.487 km (Ramadani & Trisni, 2019). Dengan gambaran inilah Filipina harus mempertahankan kedaulatan maritim mereka untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Kemudian kepentingan ekonomi Filipina dalam sengketa Laut China Selatan adalah lebih condong pada peningkatan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok. Hal ini dibuktikan dengan Tiongkok menjadi salah satu mitra dagang terbesar Filipina. Maka dari itu, upaya diplomatis yang ditempuh pemerintah Filipina dalam kepemimpinan Presiden Duterte tersebut adalah menjalin hubungan ekonomi yang baik dan berkelanjutan. Selain itu, Tiongkok juga telah menjadi negara eksportir terbesar Filipina yang mencapai nilai US\$ 15.564,90 (Philippine Statistics Authority, 2017).

Lebih lanjut, Filipina juga memiliki ketergantungan dengan Tiongkok dalam hal investasi asing. Hal ini dapat dicermati melalui peningkatan investasi Tiongkok 814 juta peso atau 53,6% mulai dari tahun 2016 (Rosales, 2018). Oleh karena itu, investasi Tiongkok dapat dijadikan Filipina sebagai instrumen dalam memulihkan perekonomian nasional dan pembangunan infrastruktur yang lebih masif. Untuk itu, walaupun kedua negara terlibat dalam sengketa Laut China Selatan, baik Tiongkok maupun Filipina lebih memprioritaskan dalam membangun perekonomian nasionalnya. Dengan melihat penjelasan di atas bahwasannya perilaku berbeda ditujukan oleh kedua negara untuk senantiasa tidak menaikkan eskalasi konflik yang pada akhirnya akan merusak hubungan diplomatik mereka. Kepentingan Filipina lainnya yakni berkaitan dengan misi pemerintahnya untuk mengatasi ancaman terhadap stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Maka dari itu, Filipina membangun kerjasama dalam bidang keamanan dengan Tiongkok. Adapun bentuk kerjasama tersebut antara lain pengiriman senjata jarak jauh untuk mendukung operasi militer terutama untuk melawan kejahatan terorisme Marawi pada tahun 2018 (Tiezzi, 2018) Oleh karena itu jika dikalkulasikan bahwa Filipina telah menerima sebanyak 3000 bantuan senjata dari Tiongkok sebagai pendukung fungsi militer terhadap keamanan nasional (Placido, 2018).

Selain itu itu, cerminan dari agresivitas Tiongkok dalam Sengketa Laut China Selatan dapat dipahami melalui perubahan doktrin Angkatan Laut (AL) Tiongkok. Laut China Selatan (LCS) adalah kawasan paling rawan konflik di dunia. Kisruh di wilayah ini bisa merefleksikan tentang sejauh mana pentingnya kekuatan laut bukan hanya negara-negara di kawasan Asia Pasifik namun juga negara-negara lain yang mempunyai masalah yang sama. Negara di kawasan Asia Pasifik hampir tak mungkin mengabaikan arti penting kekuatan laut. Pertama karena hampir semua negara di kawasan Asia Pasifik berbatasan langsung dengan laut, kedua, telah terbukti bahwa permasalahan di lautan sulit diselesaikan dengan berdiplomasi (Permatasari, 2021).

Kebangkitan Tiongkok dalam Membendung Pengaruh Amerika Serikat dalam Sengketa Laut China Selatan

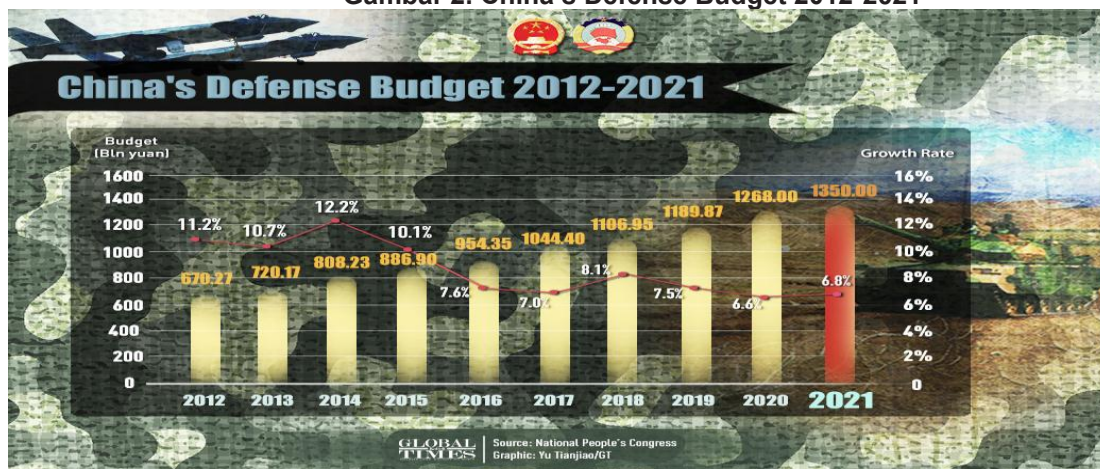
Dalam melihat kontestasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok dapat dicermati melalui ambisi dari masing-masing pihak. Lebih lanjut kepentingan Tiongkok dalam konteks Laut China Selatan adalah menggunakannya sebagai jalur perdagangan internasional dengan kebijakan *Maritime Silk's Road* (Blanchard & Flint, 2017). Kebijakan pembangunan jalur sutera oleh pemerintah Tiongkok merupakan bentuk komitmen negaranya untuk menjadikan negaranya sebagai salah satu raksasa ekonomi global. Sehingga Tiongkok meyakini bahwa Laut China Selatan dapat menjadi salah satu jalur maritim strategis yang dapat menghubungkan Asia dan Eropa.

Misi Tiongkok untuk menjadi kekuatan ekonomi global mencerminkan bahwa dirinya harus secara aktif mengamankan Laut China Selatan dari ancaman pihak luar. Walaupun demikian, Tiongkok sebenarnya ingin terjadinya perimbangan kekuatan (*balance of power*) dalam konteks politik internasional. Sehingga Tiongkok mencoba untuk mereduksi hegemoni Amerika Serikat khususnya di kawasan Asia Tenggara baik dari aspek politik maupun ekonomi. Untuk itu, Tiongkok menjadikan konflik Laut China Selatan sebagai bentuk nyata untuk mencapai kepentingannya.

Selain itu, salah satu hal yang mendasari Tiongkok untuk menguasai Laut China Selatan adalah ingin menjadikan Asia Tenggara sebagai pangsa pasar potensial (Alter, 2013). Di satu sisi, kekuatan ekonomi Tiongkok yang semakin meningkat menjadi daya tarik negara-negara di Asia Tenggara. Di sisi lain, apabila konflik Laut China Selatan dapat mengganggu stabilitas di Asia Tenggara dikhawatirkan banyak investor akan menunda investasi apalagi jika sampai terjadi konflik bersenjata. Hal inilah yang harus dihindari dari adanya konflik yang berkepanjangan.

Untuk mencapai kepentingan nasionalnya, Tiongkok tentunya membutuhkan berbagai strategi yang diharapkan membuahkan hasil yang efektif. Adapun strategi tersebut diantaranya peningkatan kapasitas militer, negosiasi bilateral dan penciptaan kawasan integrasi ekonomi (Pujiwidodo, 2017). Berbicara mengenai peningkatan kapasitas militer dalam hal ini pemerintah Tiongkok melakukan modernisasi khususnya peningkatan jumlah pasukan militer dan diikuti dengan peningkatan anggaran militer khususnya dijelaskan pada gambar 2 di bawah ini. Adanya peningkatan kapasitas militer baik secara senjata maupun pasukan diharapkan akan mampu bersaing dengan Amerika Serikat yang merupakan ancaman nyata bagi mereka.

Gambar 2. China's Defense Budget 2012-2021



Sumber: National People's Congress (Global Times, 2021).

Selain itu, pemerintah Tiongkok cenderung menggunakan pendekatan diplomasi secara bilateral dalam menyelesaikan konflik Laut China Selatan dari pada menggunakan pendekatan multilateral (Welch, 2016). Hal ini bukan berarti tanpa sebab, mengingat bahwa Tiongkok memandang konflik yang melibatkan banyak pihak ini tidak tepat untuk diselesaikan melalui forum kelembagaan ASEAN (Raine & Miere, 2013). Sehingga Tiongkok ingin mencapai hasil yang dinilai lebih efektif ketika bernegosiasi secara bilateral karena mempertimbangkan *cost and benefit* dari kekuatan masing-masing pihak. Hal ini tentu lebih menguntungkan Tiongkok yang kuat secara ekonomi.



Strategi lainnya yaitu lebih mempererat hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi dengan menciptakan jaringan perdagangan yang integratif khususnya kepada negara anggota ASEAN yang terlibat konflik, misalnya perluasan bantuan ekonomi dengan investasi (Raine & Miere, 2013). Hal ini tentu dapat dipahami sebagai bentuk dari negara maju secara ekonomi menciptakan ketergantungan kepada negara berkembang untuk mendapatkan atas apa yang mereka kehendaki. Maka dari itu, tindakan ini mencerminkan sebuah pola hubungan kerjasama yang secara tidak langsung akan mengatur perilaku negara yang diberikan bantuan ekonomi.

Konflik Laut China Selatan yang semakin juga telah menarik perhatian dari Amerika Serikat. Sebab Amerika Serikat sebagai negara *super power* yang juga memiliki posisi penting dalam tatanan politik global. Lebih lanjut, Amerika Serikat telah lama menancapkan pengaruhnya pada regional Asia Tenggara. Apabila terjadi sesuatu yang dapat mengganggu kepentingannya, maka Amerika Serikat harus terlibat didalamnya. Walaupun Amerika Serikat merupakan pihak eksternal dari konflik Laut China Selatan akan tetapi statusnya sebagai negara adidaya turut mendorong untuk menjaga kepentingannya di wilayah tersebut.

Adapun kepentingan dari Amerika Serikat dalam konflik Laut China Selatan memang secara tegas tidak mengambil kedudukan terkait klaim kedaulatan dari masing-masing pihak yang berkonflik, khususnya Tiongkok. Namun, secara tersirat Amerika Serikat menganggap posisi yang dimilikinya terkait konflik tersebut adalah berdasarkan Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut mengenai potensi klaim kedaulatan maritim. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan pemerintahan Presiden Barack Obama terkait posisi Amerika Serikat dalam konflik Laut China Selatan.

"The US takes no position on the legal merits of the competing claims to sovereignty over the various island, reefs, atolls, and cays in the South China Sea. The United States would, however, view with serious concern any maritime claim or restriction on maritime activity in the South China Sea that was not consistent with international law, including the 1982 UNCLOS" (Sinaga, 2015).

Jika dicermati pernyataan di atas, maka dapat dipahami bersama bahwasannya memang Amerika Serikat tidak menjelaskan secara jelas terkait kepentingannya di dalam konflik Laut China Selatan. Akan tetapi lebih menunjukkan pada kebebasan untuk bernavigasi di laut yang dilindungi oleh UNCLOS 1982 (Emmers, 2015). Terlepas dari hal itu, Amerika Serikat tentunya tidak ingin Laut China Selatan juga dikuasai dan dikendalikan oleh negara lain, terutama Tiongkok. Karena Amerika Serikat memandang bahwa kemunculan kekuatan baru akan mengancam posisinya yaitu pada kawasan Asia Tenggara dalam aspek politik, ekonomi dan keamanan.

Selain itu, kepentingan Amerika Serikat lainnya adalah peningkatan kapasitas negara yang berpengaruh dan kedudukannya melalui wilayah perairan yang geostrategis. Dengan tujuan untuk meningkatkan interaksi secara global melalui rute perdagangan yang aktif ini terutama pada perdagangan minyak dunia Amerika Serikat (Djuyandi et al., 2021). Untuk itu, Amerika Serikat berusaha untuk mempertahankan wilayah bebas akses pada terhadap Laut China Selatan yang akan memberikan keuntungan dan peningkatan hubungan kerjasama yang berdampak pada hegemoni ke negara-negara lain. Maka dari itu, Amerika Serikat akan terus menekan dan menandingi kekuatan Tiongkok.

Amerika Serikat memandang bahwa jika Laut China Selatan dapat diakuisisi secara sah oleh Tiongkok sebagai wilayah kedaulatan teritorialnya. Maka berbagai kepentingan dari negara-negara yang melewati perairan ini harus mendapatkan izin dari pemerintah Tiongkok untuk memperoleh akses. Guna mengatasi hal tersebut, Amerika Serikat terus melakukan pantauan terhadap aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh Tiongkok. Walaupun sikap Tiongkok yang memicu ketegangan pada wilayah perairan ini dan memunculkan kekhawatiran dimana eskalasi konflik akan semakin meningkat dan implikasinya pada perekonomian secara global.

Oleh karenanya kepentingan politik Amerika Serikat tersebut juga dijalankan melalui kebijakan *Freedom of Navigation* (FON) (Djuyandi et al., 2021). Pemberlakuan kebijakan ini menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat internasional terutama negara yang membawa kepentingan dan hubungan luar negeri dapat mengakses Laut China Selatan dengan bebas. Kebijakan ini didasarkan atas hukum internasional (UNCLOS) dan lembaga peradilan internasional telah mengatur hal ini terkait hukum laut. Dengan ini Amerika Serikat tentu memposisikan dirinya sebagai bentuk preventif terhadap sesuatu yang membahayakan keamanan manusia dan untuk menegakkan perdamaian dan keamanan khususnya di wilayah laut.

Perhatian Amerika Serikat yang cukup intens mengenai konflik Laut China Selatan ini setidaknya akan menjadikan negara anggota ASEAN sebagai mitra politik dan ekonomi. Hal ini penting mengingat



bahwa penciptaan aliansi atau dukungan terhadap pihak-pihak yang bersengketa memungkinkan Amerika Serikat akan tetap menjadi negara adidaya. Walaupun terdapat perubahan dalam percaturan politik global mengenai pengaruh Amerika Serikat. Hal ini tentu akan membuat Amerika Serikat semakin aktif dalam mendapatkan pengaruh terhadap ASEAN. Maka dari itu perlunya menjaga stabilitas keamanan di Laut China Selatan.

Sebenarnya Amerika Serikat tidak memiliki kepentingan secara langsung dalam konflik Laut China Selatan. Akan tetapi demi terwujudnya stabilitas perdamaian antara Tiongkok dan pihak-pihak yang berkonflik. Sehingga negara sekutunya yang berada di kawasan Asia Tenggara penting untuk melibatkan Amerika Serikat dalam mengatasi klaim dan segala bentuk tindakan provokatif yang dilakukan oleh Tiongkok. Maka, hal inilah yang turut mendasari Amerika Serikat untuk menjaga kepentingan nasionalnya dengan menciptakan perdamaian dunia. Memang tidak dapat diragukan lagi bahwa perluasan dukungan politik dan militer terhadap sekutunya menjadikan Amerika Serikat memiliki legitimasi yang cukup kuat dalam membangun kekuatan untuk menghadapi Tiongkok dengan tujuan untuk mempertahankan hegemoninya di kawasan Asia Pasifik (Bidara et al., 2018).

Memang jika suatu negara telah menguasai wilayah tertentu baik dengan cara yang damai ataupun sebaliknya, maka negara tersebut akan mendapatkan kontrol secara penuh. Artinya baik Amerika Serikat maupun Tiongkok dengan masing-masing kepentingannya akan semakin menunjukkan kekuatannya dari bidang apapun dengan tujuan perluasan wilayah kekuasaan. Walaupun letak geografis yang cukup jauh terhadap Laut China Selatan tidak membuat Amerika Serikat hanya diam saja atau tidak merespon. Akan tetapi justru yang menjadi dorongan adalah ambisi Amerika Serikat untuk mempertahankan kekuatan hegemon global.

Status Amerika Serikat sebagai negara adidaya baik dari aspek politik maupun ekonomi dapat dijadikan sebagai kekuatan penting dalam memperluas kekuasaan terhadap suatu wilayah. Pada intinya memang keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Laut China Selatan hingga saat ini adalah menjadikan Laut China Selatan sebagai wilayah perairan internasional. Dengan kata lain, tidak ada negara yang dapat mengklaim wilayah perairan tersebut dengan alasan apapun. Lebih lanjut, setiap negara manapun berhak untuk menggunakan Laut China Selatan sebagai penunjang dalam meningkatkan konektivitas terkait aktivitas perdagangan internasional. Jika dicermati bersama bahwa kontestasi perebutan kekuasaan di wilayah perairan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok ingin menggeser pengaruh Amerika Serikat dan menjadikan negaranya sebagai kekuatan hegemon baru di dalam konstelasi politik internasional.

SIMPULAN DAN SARAN

Secara garis besar, konstelasi politik dalam dunia internasional telah mengalami dinamika. Adapun perubahan tersebut dapat dilihat dari adanya fenomena kebangkitan China yang berhasil membangun perekonomiannya. Dengan kata lain, status perekonomian China dari ekonomi negara berkembang berubah menjadi salah satu negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia dengan menerapkan sistem perekonomian liberal. Hal ini dapat menjadi kekuatan China dalam menjadikannya sebagai negara yang maju dalam aspek ekonomi dan politik. Bahkan dalam perkembangannya China yang muncul sebagai kekuatan global diprediksi akan menjadi negara super power menggantikan Amerika Serikat di masa depan. Namun, proyeksi ini sifatnya masih harus dicermati lebih lanjut.

Selain itu, munculnya Tiongkok sebagai negara yang maju dalam ekonomi dapat dilihat dari usahanya untuk menguasai kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut dibuktikan dengan tindakan Tiongkok untuk membangun konektivitas perdagangan internasional melalui Inisiatif Jalur Sutra yang justru banyak diterima oleh negara berkembang maupun negara maju. Kemudian, tindakan provokasi Tiongkok terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan dengan membangun pangkalan militer yang dikhawatirkan akan memunculkan konflik terbuka. Di samping itu, negara berkembang di Asia Tenggara semakin meningkatkan ketergantungan dari Tiongkok dalam hal investasi dan pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu, kebangkitan Tiongkok yang merubah tatanan dunia internasional berdampak pada keruntuhan supremasi Amerika Serikat yang selama ini menjadi negara hegemoni. Dalam artian bahwa Tiongkok pada akhirnya mendapatkan sebuah popularitas di dunia internasional untuk menghentikan dominasi Amerika Serikat. Terlepas dari hal tersebut, superioritas Amerika Serikat dalam konteks Asia Tenggara secara perlahan mengalami kemunduran. Hal ini diakibatkan karena Amerika Serikat sering melakukan intervensi terhadap masalah internal negara anggota Asia Tenggara. Dengan demikian, rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat akan semakin memanas untuk kedepannya.



DAFTAR RUJUKAN

- Almond, R. G. (2018). *Trade, War, and the South China Sea*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2018/09/trade-war-and-the-south-china-sea/>
- Alter, B. (2013). *New era of China-ASEAN trade and investment relations*. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/news/2013/12/12/new-era-china-asean-trade-and-investment-relations.html>
- BBC. (2016). *Why is the South China Sea contentious?* BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13748349>
- BBC. (2020). *Laut China Selatan: Aksi China memburu sumber daya "melanggar hukum", kata Menlu AS*. BBC News. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53399174>
- Bidara, M. A., Mamentu, M., & Tulung, T. (2018). Kepentingan Amerika Dalam Konflik Laut China Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 01–15.
- Blanchard, J. M. F., & Flint, C. (2017). The geopolitics of China's maritime silk road initiative. *Geopolitics*, 22(2), 223–245. <https://doi.org/10.1080/14650045.2017.1291503>
- Chan, I., & Li, M. (2015). New Chinese Leadership, New Policy in the South China Sea Dispute? *Journal of Chinese Political Science*, 20(1), 35–50. <https://doi.org/10.1007/s11366-014-9326-y>
- Ciorciari, J. D., & Weiss, J. C. (2012). Conflict & Security. *Journal of International Affairs*, 61–69.
- CNN Philippines. (2020). *China to soon build air, naval bases in Scarborough Shoal, Carpio warns*. CNN Philippines. <https://www.cnnphilippines.com/news/2020/6/9/China-build-air-naval-bases-Scarborough-Shoal.html>
- Djuyandi, Y., Illahi, A. Q., & Aurel, A. C. H. (2021). Konflik Laut China Selatan Serta Dampaknya Atas Hubungan Sipil Militer Di Asia Tenggara. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 112–124. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i1.2021.112-124>
- Emmers, R. (2015). *The US Rebalancing Strategy: Impact on the South China Sea*. National Security College. <http://nsc.anu.edu.au/documents/occasional-5-brief-8.pdf>
- Farhana, F. (2014). Understanding the Chinese Perspective on Solving Disputes In The South China Sea. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(3), 167–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v11i1.196>
- Global Times. (2021). *China's Defense Budget 2012-2021*. Global Times. <https://www.globaltimes.cn/page/202103/1217419.shtml>
- Haryanto, A., & Bainus, A. (2017). Implikasi Declaration of Conduct Laut Tiongkok Selatan Tahun 2002 Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Media Hukum*, 24(1), 88–95. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0093.88-95>
- Haryanto, A., & Darmawan, A. B. (2017). Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Ancaman Bagi Komunitas Keamanan ASEAN? *Jurnal Global & Strategis*, 9(2), 277–292. <https://doi.org/10.20473/jgs.9.2.2015.277-296>
- Hayton, B. (2019). The Modern Origins of China's South China Sea Claims: Maps, Misunderstandings, and the Maritime Geobody. *Modern China*, 45(2), 127–170. <https://doi.org/10.1177/0097700418771678>
- Hiep, L. H. (2016). Vietnam's Pursuit of Alliance Politics in the South China Sea. In *Power Politics in Asia's Contested Waters: Territorial Disputes in the South China Sea* (pp. 271–288). Springer Internasional.
- Junef, M. (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 219–240. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.219-240>
- Kemlu RI. (2013). *Laut China Selatan*. Kemlu RI. https://kemlu.go.id/portal/id/read/101/halaman_list_lainnya/laut-china-selatan
- Kompas. (2020). *Memanas, China Tuding AS Lakukan Provokasi di Laut China Selatan*. Kompas. <https://www.kompas.com/global/read/2020/07/14/144131470/memanas-china-tuding-as-lakukan-provokasi-di-laut-china-selatan?page=all>
- London, B. (2020). *The tiny islands that could explode the China-Vietnam relationship*. CNN. <https://edition.cnn.com/2019/08/29/asia/vietnam-china-paracel-islands-intl-hnk/index.html>
- Mas'oed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3ES.
- McRae, D. (2019). Indonesia's South China Sea Diplomacy: A Foreign Policy Illiberal Turn? *Journal of Contemporary Asia*, 49(5), 759–779. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1601240>
- Morghentau, H. J., & Thompson, K. W. (1985). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and*



- Peace (Ke-6). McGraw-Hill.
- Ortueste, M. (2013). *The Philippines in the South China Sea: Out of Time, Out of Options?* (D. Singh (ed.)). ISEAS Publishing.
- Perez-Alvaro, E., & Forrest, C. (2018). Maritime archaeology and underwater cultural heritage in the disputed south China sea. *International Journal of Cultural Property*, 25(3), 375–401. <https://doi.org/10.1017/S0940739118000176>
- Permatasari, M. (2021). *Wajah ASEAN dan Keseimbangan Baru di Asia Pasifik*. Kompas. <https://www.kompas.com/global/read/2021/02/12/095206770/wajah-asean-dan-keseimbangan-baru-di-asia-pasifik?page=all>
- Philippine Statistics Authority. (2017). *Foreign Trade Statistics of the Philippines: 2016*. Philippine Statistics Authority. <https://psa.gov.ph/content/foreign-trade-statistics-philippines-2016>
- Placido, D. (2018). *Duterte thanks “sovereign equal” China for infra, anti-terror aid*. ABS-CBN News. <https://news.abs-cbn.com/news/04/10/18/duterte-thanks-sovereign-equal-china-for-infra-anti-terror-aid>
- Political Science. (2018). *Elements of National Power*. Political Science. <https://www.politicalscienceview.com/elements-of-national-power/>
- Pujiwidodo, D. (2017). EFEKTIFITAS STRATEGI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DALAM MENGUASAI LAUT CHINA SELATAN PASCA PUTUSAN BADAN ARBITRASE INTERNASIONAL 2016. *JOM Fisip UNRI*, 4(2), 01–11.
- Quang, N. M. (2019). *Saving the China-ASEAN South China Sea Code of Conduct*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2019/06/saving-the-china-asean-south-china-sea-code-of-conduct/>
- Raine, S., & Miere, C. Le. (2013). *Regional Disorder: the South China Sea Dispute, The International Institution for Strategic Studies*. Routledge.
- Ramadani, S., & Trisni, S. (2019). Analisis Kebijakan Luar Negeri Filipina Terhadap Cina Terkait Sengketa Laut Tiongkok Selatan pada Masa Duterte. *Intermestic*, 4(1), 46–67. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v4n1.4>
- Rosales, P. J. (2018). *The Philippines - National Study Infrastructure Financing Strategies for Sustainable Development*. UNESCAP. https://www.unescap.org/sites/default/d8files/3-Philippines_National_Study_printer_rev_0.pdf
- Setiawan, A. (2017). Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan: Tinjauan atas Analisa Barry Buzan. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(1), 33–62. <https://doi.org/10.31599/jkn.v3i1.8>
- Sorongon, T. P. (2021). *Awas “Adu Jotos”, Kapal Perang AS-China di Laut China Selatan*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210413082201-4-237337/awas-adu-jotos-kapal-perang-as-china-di-laut-china-selatan>
- The Guardian. (2012). *Philippines accuses China of deploying ships in Scarborough shoal*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2012/may/23/philippines-china-ships-scarborough-shoal>
- Tiezzi, S. (2018). *Duterte’s China Convergence Continues*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2018/04/dutertes-china-convergence-continues/>
- US Energy Information Administration. (2013). *South China Sea*. US Energy Information Administration. https://www.eia.gov/international/analysis/regions-of-interest/South_China_Sea
- Vujakovic, P. (2020). The map is the story: the U-shaped line in western news media coverage of the geopolitics of the South China Sea. *International Journal of Cartography*, 6(2), 179–201. <https://doi.org/10.1080/23729333.2018.1541581>
- Welch, D. A. (2016). *China’s Curious South China Sea Negotiation Policy*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2016/06/chinas-curious-south-china-sea-negotiation-policy/>
- Widian, R., & Arimadona, A. (2018). Cooperation & Security Dilemma In The South China Sea. *Jurnal Global Strategis*, 12(2), 91–106. <https://doi.org/10.20473/jgs.12.2.2018.91-106>
- Zhao, S. (2018). China and the South China sea arbitration: Geopolitics versus international law. *Journal of Contemporary China*, 27(109), 1–15. <https://doi.org/10.1080/10670564.2017.1363012>
- Zizi, S., Jalil, B., Ahzran, A., Perman, B., Zaaba, Z. B., Sains, F., Polisi, P., & Mara, U. T. (2020). Hubungan Malaysia-China Dalam Isu Laut China Selatan : Satu Analisis. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 5, 48–64.